

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah yang mulai diberlakukan semenjak tanggal 1 Januari 2001 lalu telah mendorong pelaksanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kerangka menciptakan nilai kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat di daerah.

Tata pemerintahan yang baik (*good governance*), lebih menekankan pada interaksi berbagai peran diantara berbagai pelaku pembangunan di daerah, baik itu masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dengan diatur oleh prinsip bersama; akuntabilitas, transparansi, partisipasi dan *rule of law*. Interaksi tersebut memberikan penekanan fungsi dan peran pada berbagai pelaku pembangunan, yang antara lain adalah;

- Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai katalisator yang memberikan lingkungan kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya inisiatif lokal dalam kerangka untuk menghasilkan berbagai nilai dan makna bagi pembangunan daerah,
- Peran dunia usaha adalah menghasilkan nilai ekonomis dalam kerangka mensejahterakan masyarakat setempat. Agenda semacam penciptaan lapangan pekerjaan serta pendapatan yang layak bagi masyarakat seharusnya dikerjakan secara intensif maupun ekstensif oleh dunia usaha setempat dengan dukungan dari masyarakat dan Pemerintah Daerah,
- Peran masyarakat adalah menciptakan nilai sosial bagi pengembangan modal sosial kehidupan masyarakat setempat, disamping ikut berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan terutama yang secara langsung akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Pemberlakuan konsepsi tata pemerintahan yang baik, selanjutnya menuntut kemampuan pihak-pihak terkait untuk me-

laksanakan peran dan fungsinya secara optimal. Pemerintah Daerah mampu menjadi *enabler*, dunia usaha mampu menjadi inovator dan mesin ekonomi pendorong kesejahteraan masyarakat serta masyarakat berdaya untuk memupuk modal sosial (*social capital*) dan berpartisipasi bagi kebijakan-kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka.

Sejalan dengan konsepsi tersebut, Tata pemerintahan yang baik sejauh ini telah diakomodasi dalam beberapa prosedur legal Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pusat, dimana kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Daerah, yang berprinsip pada demokrasi, partisipasi masyarakat serta pengembangan peran dan fungsi berbagai pranata dan potensi daerah.

Konteks penerapan prinsip Tata Pemerintahan yang baik dalam era otonomi daerah di Propinsi Kalimantan Tengah maka beberapa langkah yang telah dan akan dilakukan oleh Pemerintah Propinsi adalah;

- Penataan kewenangan antara daerah Propinsi dengan daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketetapan UU 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom,
- Pengembangan Struktur kelembagaan yang mengacu pada lingkup kewenangan yang dilaksanakan serta sesuai dengan Ketetapan Peraturan Pemerintah No 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
- Pengembangan berbagai sistem dan prosedur sesuai dengan konteks kewenangan, peraturan perundang-undangan dan struktur organisasi yang telah terbentuk. Beberapa sistem dan prosedur yang selanjutnya akan dikembangkan oleh daerah misalnya ; sistem dan prosedur perencanaan pembangunan daerah, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah, sistem dan prosedur pertanggungjawaban pemerintahan daerah dan beberapa sistem serta prosedur terkait lainnya.

Penyusunan Rencana Strategis Daerah dalam hal ini merupakan upaya kolaboratif berbagai pihak di daerah dalam melaksanakan sistem dan prosedur baru perencanaan pembangunan daerah yang lebih terfokus pada penanganan isu strategis yang mengemuka di daerah serta sesuai telah diatur dengan PP No. 108/2000 Tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah.

Rencana Strategis Daerah selanjutnya berfungsi sebagai dokumen rencana kerja Pemerintah lima tahunan yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

1.2. PENGERTIAN RENCANA STRATEGIS DAERAH

Rencana strategis Daerah adalah dokumen *Perencanaan Taktis-Strategis Daerah*. Dokumen ini menjabarkan potret permasalahan pembangunan daerah serta Indikasi daftar program dan kegiatan untuk memecahkan permasalahan secara terencana dan bertahap, untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mengutamakan kewenangan wajib disusul dengan bidang lainnya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah.

1.3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI RENSTRADA

Rencana Strategis Daerah berkedudukan dan memiliki fungsi, antara lain sebagai berikut:

1. Menjabarkan visi dan misi penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sebagaimana dituangkan dalam Pola Dasar dan Propeda, kedalam rencana program dan kegiatan lima tahunan daerah, dengan menggunakan bahasa program yang bersifat lebih taktis - strategis;
2. Menguraikan rincian daftar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rentang periode lima tahunan melalui sumber pembiayaan APBD berdasarkan pada skala prioritas, dengan memberikan penekanan pada:

- a. Program dan kegiatan yang berimplikasi pada rencana pendapatan daerah;
- b. Program dan kegiatan yang berimplikasi pada belanja daerah.
3. Merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Daerah pada setiap akhir tahun anggaran dan akhir masa jabatan, dengan menggunakan lima tolok ukur, yakni:
 - a. Masukan;
 - b. Keluaran;
 - c. Hasil;
 - d. Manfaat; dan
 - e. Dampak

1.4. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN RENSTRADA

Tujuan dan sasaran penyusunan Rencana Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ini adalah:

1. Mengidentifikasi permasalahan isu strategis yang dihadapi daerah Propinsi Kalimantan Tengah,
2. Mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang dihadapi daerah Propinsi Kalimantan Tengah;
3. Merumuskan Arah kebijaksanaan, prioritas program, kegiatan dan tolok ukur kinerja pembangunan daerah Kalimantan Tengah sesuai dengan horizon waktu pemberlakuan Renstrada Propinsi Kalimantan Tengah tersebut;
4. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan kebutuhan daerah;

1.5. LANDASAN PENYUSUNAN RENSTRADA

Landasan penyusunan Renstrada terdiri dari Landasan hukum dan manajerial. Komponen-komponen landasan hukum dan manajerial adalah seperti yang disebutkan di bagian berikut ini.

1.5.1. Landasan Hukum

1. Landasan Idiil: Pancasila,
2. Landasan Konstitusional: UUD 1945,
3. Landasan Operasional: GBHN 1999-2004, Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta Peraturan Pemerintah No 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban Kepala Daerah

1.5.2. Landasan Manajerial

1. UU No. 22 Tahun 1999, Tentang Pemerintahan Daerah
2. UU No 25 Tahun 1999, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah;
3. PP 25 Tahun 2000, Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
4. PP 1.05 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
5. PP 106 Tahun 2000, Tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
6. PP 108 Tahun 2000, Tentang Tata Cara Pertanggung-jawaban Kepala Daerah;
7. Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2001, Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001 - 2005;
9. Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2001, Tentang Program Pembangunan Daerah (propeda) Kalimantan Tengah 2001 - 2005;

1. Surat Edaran Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 050/1240/11/Bangda Tahun 2001, Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Propinsi, Kabupaten dan Kota,

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ini adalah sebagai berikut :

- Bab I. Pendahuluan
- Bab II. Kinerja Umum Pembangunan Daerah
- Bab III. Visi, Misi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
- Bab IV. Program dan Kegiatan Strategis Daerah
- Bab V. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja
- Bab VI. Matriks Daftar Indikasi Program dan Kegiatan Daerah
- Bab VII. Penutup

BAB 2 KINERJA UMUM PEMBANGUNAN DAERAH

2.1. KONDISI GEOGRAFIS

Propinsi Kalimantan Tengah memiliki luas 153.564 km², secara astronomis terletak pada posisi 1110 - 1150 Bujur Timur dan 0°45' Lintang Utara – 3°30' Lintang Selatan. Secara administratif, propinsi Kalimantan Tengah ini memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kaltim dan dan Kalbar
- Sebelah Timur juga berbatasan dengan Kaftim dan dan Kalbar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan laut Jawa,
- Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Barat,

Kondisi fisik wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, terdiri atas daerah pantai dan rawa yang terdapat di wilayah bagian Selatan sepanjang ± 750 km pantai laut Jawa, yang membentang dari Timur ke Barat dengan ketinggian antara 0 - 50 m di atas permukaan laut (dpl) dan tingkat kemiringan antara 0% - 8%.

Tabel 2.1.
Penyebaran dan Luas Wilayah Daratan Propinsi Kalimantan Tengah

No	Kelas Ketinggian (dpl)	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	0-7	2.105.510	13,69
2.	7-25	2.269.717	14,76
3.	25-100	6.398.923	41,66
4.	100-500	3.327.459	21,63
5.	> 500	1.278.391	8,31

Sumber : Bappeda Propinsi Kalteng, Pengembangan KSP propinsi Kalteng Tahun 2000.

Sementara itu, wilayah daratan dan perbukitan berada pada bagian tengah, sedangkan pegunungan berada di bagian utara dan barat daya dengan ketinggian 50 - 100 dpl dan tingkat kemiringan rata-rata sebesar 25%.

Tabel 2.2.

Luas masing-masing Kelas Kemiringan Wilayah Daratan Propinsi Kalimantan Tengah

No	Kelas Lereng (m)	Luas (Ha)	Prosentase (%)
1.	0-2	4.955.715	32.22
2.	2-15	4.449.227	28.93
3.	15-40	4.413.385	28.73
4.	> 40	1.556.671	10.12

Sumber: Bappeda Propinsi Kalteng, Pengembangan KSP propinsi Kalteng Tahun 2000

Sedangkan secara fisiografis, Propinsi Kalimantan Tengah terdiri atas 6 wilayah yang didominasi oleh daratan perbukitan pedalaman rendah, secara lebih lengkap diurai pada tabel 2.3.

Tabel 2.3.

Luas Wilayah Fisiografis di Propinsi Kalimantan Tengah

No	Wilayah	Luas (km ²)
1.	Daratan rendah pesisir	36.870
2.	Undak-Undak pedalaman	37.310
3.	Dataran dan perbukitan pedalaman	36.870
	Pegunungan Schwaner	57.124
4.	Pegunungan Muller	9.000
5.	Pegunungan Meratus	11.000
6.		2.300

Sumber: Bappeda Propinsi Kalteng, Pengembangan KSP propinsi Kalteng Tahun 2000

Berdasarkan kerangka tektonik regional Kalimantan, daerah propinsi Kalimantan Tengah termasuk dalam cekungan Barito yang terletak di sisi tenggara lempeng mikro Sunda. Bagian utara dipisahkan dengan cekungan Kutai oleh "*Patemoster Fault System*" atau "*Barito-Kutai Cross High*". Sebelah timur dipisahkan dengan cekungan asem-asem dan cekungan pasir oleh pegunungan Meratus. Di sebelah selatan merupakan batas tidak tegas dengan cekungan Jawa Timur dan di sebelah barat oleh tinggian Sunda. Pembagian stratigrafi cekungan Barito dari tua ke muda adalah sebagai berikut;

- Batuan Dasar Pra-Tersier, terdiri dari batuan metasedimen dan batuan beku.
- Formasi Tanjung, bagian bawah didominasi oleh batuan pasir dan konglomerat dengan interkalasi batubara, bagian tengah selang-seling batu pasir, batu lanau dan batu lempung serta bagian atas terdiri dari batu lempung gampingan dengan interkalasi batu gamping dan batu bara.
- Formasi Montalat, terdiri dari batu pasir kuarsa, agak padat, sisipan batu lempung dan batu bara.
- Formasi Berai, bagian bawah terdiri dari selang-seling batu gamping dengan napal, bagian tengah berupa bagian batu gamping masif berupa kerangka dari suatu terumbu dan pada bagian bawah terdiri dari selang-seling batu gamping dengan batu lempung dan batu bara.
- Formasi Warukin, bagian bawah selang-seling antara batu pasir dengan batu lempung dan batu bara.
- Formasi Dohor, terdiri dari batu pasir, batu lanau dengan interkalasi batu lempung dan batu bara serta fragmen batuan yang lebih tua.

Sebagian besar wilayah daratan Kalimantan Tengah terdiri dari jenis tanah podsolik merah kuning. Pada dasarnya jenis tanah di Kalimantan Tengah terdiri dari: organosol, laterit, regosol, alluvial, podsol, lithosol dan latosol.

Tabel 2.4.
Luas Masing-masing Jenis Tanah
di Wilayah Daratan Propinsi Kalimantan Tengah

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Podsolik Merah Kuning	6.033.693	39.60
2.	Orgnosol	2.534.766	11.63
3.	Laterit	2.118.460	13.90
4.	Regosol	1.452.305	9.53
5.	Alluvial	1.423.803	9.34
6.	Podsol	1.040.452	6.51
7.	Lithosol dan	413.793	2.71
8.	Latosol	269.360	1.77

Sumber: Bappeda Propinsi Kalteng, Pengembangan KSP propinsi Kalteng Tahun 2000.

Sedangkan Karakteristik iklim Propinsi Kalimantan Tengah

- Type iklim: Tropis lembab dan panas
- Klasifikasi koppen: Afa
- Suhu udara : rata-rata 29°C maksimum 33° C Curah hujan rata-rata
- tahunan: 2.732 mm dengan rata-rata hari hujan 120 hari.
- Kalisifikasi curah hujan Schmidt dan Farguson: Type - A (Q=14,3 %) dan Type - B (Q=33,3 %), makin ke utara curah hujan semakin tinggi.

2. KEPENDUDUKAN

Jumlah penduduk Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2001 belumlah 1.801.707 orang dengan perbandingan 49% perempuan dan 51% laki-laki. Perbandingan luas wilayah dengan jumlah penduduk menunjukkan bahwa tingkat kepadatan

penduduk Propinsi Kalimantan Tengah tergolong tidak padat yaitu 11,73 jiwa/km².

Bila diamati menurut Kabupaten/Kota, terdapat perbedaan kepadatan penduduk yang cukup berarti, dimana Kota Palangkaraya sebagai ibukota Propinsi merupakan kota dengan kepadatan paling tinggi yaitu 71.50 jiwa/km², sedangkan Barito Utara merupakan Kabupaten dengan kepadatan paling rendah yaitu 6.03 jiwa/km².

Tabel 2.5.
Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah
Propinsi Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Persentase Luas Wilayah	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Kotawaringin Barat	21.000	13.68	248 289	11.82
2	Kotawaringin Timur	50.700	33.01	490 378	9.68
3	Kapuas	34.800	22.66	512 863	14.73
4	Barito Selatan	12.664	8.25	184 810	14.59
5	Barito Utara	32.000	20.84	193 046	6.03
6	Palangka Raya	2.400	1.56	171 599	71.5
	Jumlah	153.564	100	1801707	11.73

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001

Dari keseluruhan penduduk Propinsi Kalimantan Tengah, 78 % berumur 10 tahun ke atas merupakan penduduk usia produktif secara ekonomis. Komposisi angkatan kerja di Propinsi Kalimantan Tengah yang tertinggi adalah kelompok umur 25 sampai dengan 29 tahun, sejumlah 126.785 angkatan kerja.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk dan Jumlah Angkatan Keda
Propinsi Kalimantan Tengah Menurut Kelompok Umur
Tahun 2001

No.	Kelompok Umur	Jumlah Penduduk	Jumlah Angkatan Kerja
1.	0-4	162813	0
2.	5-9	238263	0
3.	10-14	214471	13992
4.	15-19	176920	81961
5.	20-24	153880	100627
6.	25-29	163192	126785
7.	30-34	162837	120324
8.	35-39	158475	123503
9.	40-44	112573	93467
10.	45-49	81794	65196
11.	50-54	65027	53693
12.	55-59	33236	23437
13.	60-64	29972	17650
14.	65+	28254	13012
	Jumlah	1 801 707	833 647

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001

Sebagian besar (57%) penduduk berumur 10 tahun keatas (produktif secara ekonomis) bekeja di sektor Pertanian, sedangkan sektor terkecil penyerapannya adalah sektor Keuangan yaitu sebesar 2%.

Tabel 2.7.
Penduduk Berumur 10 Tahun Keatas Yang Bekerja
Menurut Lapangan Usaha Utama Tahun 2001

No	Lapangan Usaha Utama	Jumlah Angkatan Kerja
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan, Perikanan	455.432
2.	Pertambangan dan Penggalian	26.916
3.	Industri Pengolahan	24.743
4.	Listrik, Gas dan Air	0
5.	Bangunan	49.520
6.	Perdagangan, Besar, Eceran, Rumah Makan, Hotel, Angkutan, Pergudangan, Komunikasi	
7.	Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah	110.905
8.	Jasa Perusahaan	31.268
9.	Jasa Kemasyarakatan	17.141
	Jumlah	833647

Sumber: Kalimantan Tengah Dalam Angka, BPS Propinsi Kalimantan Tengah Tahun 2001

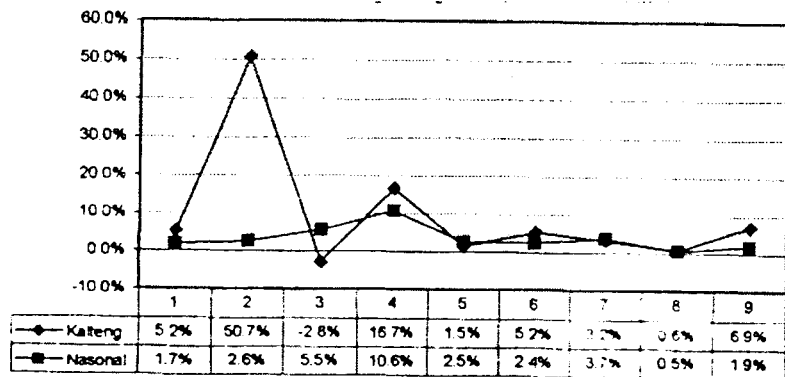
2.3. PEREKONOMIAN

2.3.1. Pertumbuhan dan Sumbangan Sektoral

Selama periode pengamatan, tahun 1993 sampai dengan tahun 2000, rerata pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah cenderung lebih tinggi daripada rerata pertumbuhan PDB nasional. Bila dilihat lebih spesifik, sektor yang rerata pertumbuhannya terbesar adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar 50,7% setiap tahunnya. Pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian ini jauh melebihi pertumbuhan sektor yang sama secara nasional yang hanya mencapai rata-rata , sebesar 2,6% per tahun. Sektor lain

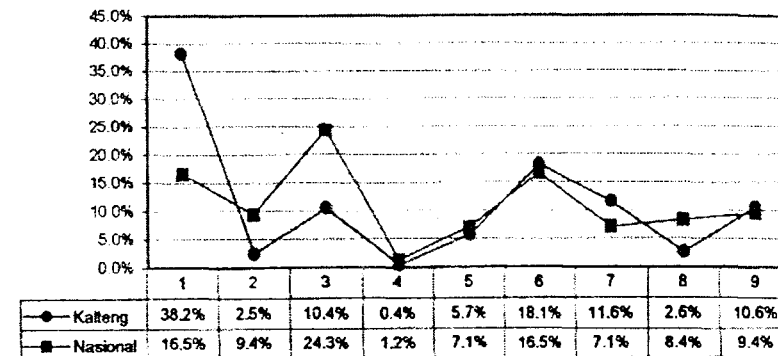
yang mengalami pertumbuhan yang cukup berarti di Kalimantan Tengah antara lain; sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan. Perhatikan bagan 2.1. di bawah.

Bagan 2.1. Perbandingan Rata-rata Pertumbuhan Sektor PDRB Propinsi Kalimantan Tengah dengan POB, Tahun 1993 s.d 2000.



Ket :
 1 = Pertanian
 2 = Pertambangan dan Penggalian
 3 = Industri Pengolahan
 4 = Listrik dan Air Bersih
 5 = Bangunan / Konstruksi
 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
 7 = Pengangkutan dan telekomunikasi
 8 = Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 9 = jasa-jasa

Bagan 2.2
 Perbandingan Rata-rata Kotribusi Sektor PDRB
 Propinsi Kalimantan Tengah dengan PDB,
 Tahun 1993 s.d. 2000

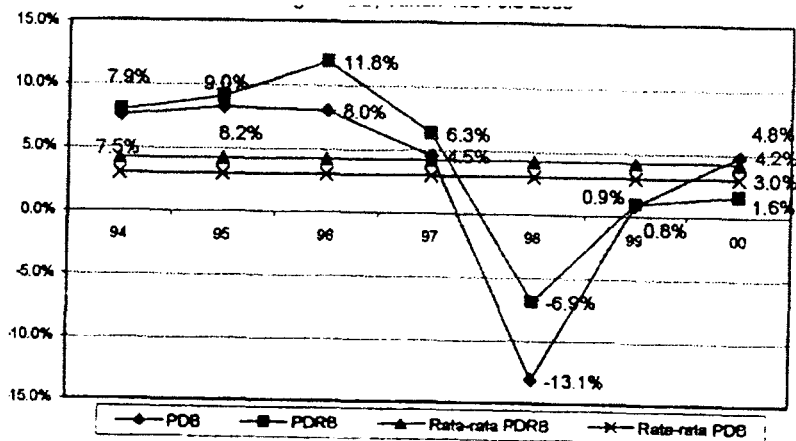


Ket :
 1 = Pertanian
 2 = Perimbangan dan Penggalian
 3 = Industri Pengolahan
 4 = Listrik dan Air Bersih
 5 = Bangunan / Konstruksi
 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
 7 = Pengangkutan dan telekomunikasi
 8 = Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 9 = Jasa-lasa

Dilihat dari rata-rata kontribusi sektoral per tahunnya, sektor pertanian dan penggalian ini menyumbang angka terendah kedua setelah listrik, gas dan air bersih yaitu sebesar 2,5% per tahunnya. Selama periode pengamatan yang sama (1993-2000), sektor yang paling tinggi kontribusi terhadap PDRB Propinsi Kalimantan Tengah adalah sektor pertanian yaitu sebesar 38,2% per tahun, dimana kontribusi sektor ini di berbagai daerah pada PDB hanyalah sebesar 16,5% per tahunnya. Sedangkan secara nasional sektor yang paling tinggi kontribusinya adalah sektor industri pengolahan yaitu sebesar 24,3% per tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa selama tahun pengamatan (1993 s.d 2000) perekono-

mian Propinsi Kalimantan Tengah didominasi sektor pertanian. Sedangkan pada tingkat nasional perekonomian sudah bergeser pada sektor industri pengolahan.

Bagan 2.3
Perbandingan Pertumbuhan PDRB Prop. Kalimantan Tengah dengan PDB, Tahun 1994 s.d 2000



Ket:
 1 = Pertanian
 2 = Pertambangan dan Pengalain
 3 = Industri Pengolahan
 4 = Listrik dan Air Bersth
 5 = Bangunan / Konstruksi
 6 = Perdagangan, Hotel dan Restoran
 7 = Pengangkutan dan lelekomunikasi
 8 = Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
 9 = Jasa-jasa

Diperhatikan lebih jauh, tampaknva fluktuasi pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Tengah memiliki kecenderungan kemiripan yang serupa dengan perekonomian nasional, hanya pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000 pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Tengah tumbuh lebih lambat jika dibandingkan dengan perekomian

nasional. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian di Kalimantan Tengah relatif lebih lambat keluar dari dampak krisis jika dibandingkan Propinsi lain secara nasional; dimana pada tahun 2000 perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh sebesar 1,6% lebih rendah 2,6% dari angka pertumbuhan rata-rata per tahunnya yaitu sebesar 4,2% yang lebih tinggi jika dibandingkan secara nasional, yaitu sebesar 3,0% saia. Sedangkan secara nasional pada tahun 2000 ini pertumbuhan perekonomian mencapai angka 4,8%, di atas pertumbuhan rata-rata per tahunnya yaitu sebesar 3,0%.

Akan tetapi jika dilihat tiap tahun, nampak bahwa sebenarnya perekonomian di Kalimantan Tengah selalu lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan perekonomian nasional. Hal tersebut juga tampak jika dilihat dari angka rata-rata pertumbuhannya yaitu 4,2% per tahun pada PDRB di Kalimantan Tengah, sedangkan secara nasional (PDB) angka pertumbuhannya pada 3,0% per tahun.

Ketika terjadi krisis ekonomi pada tahun 1997, yang secara makro berakibat pada penurunan tingkat pertumbuhan perekonomian nampak bahwa di Kalimantan Tengah relatif lebih tahan jika dibandingkan perekonomian nasional, dimana pada tahun 1998 mengalami pertumbuhan negatif sebesar -6,9% jika dibandingkan angka pertumbuhan nasional pada angka -13,1%. Dan pada tahun 1999 sudah ada pada titik pertumbuhan yang relatif sama, yaitu 0,9% adalah pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Tengah dan 0,8% adalah angka pertumbuhan perekonomian nasional.

2.3.2 Analisis Sektor Basis

Untuk melihat potensi ekonomi suatu daerah, digunakan tiga pendekatan, yaitu: Metode *Location Quotient (LQ)*, Analisis *Shift-Sliare* dan *Klassen Typology*. Teori Basis Ekonomii (*Economic Base Theory*) menyatakan bahwa faktor penentu pertumbuhan ekonomi Daerah adalah permintaan (*demand*) barang dan jasa dari luar daerah (ekspor).

Atas dasar prinsip ini, maka produk sektor di propinsi Kalimantan Tengah yang sangat diminati dan dibutuhkan Daerah lain perlu dibantu dan didorong sebagai motor pembangunan di daerah Propinsi Kalimantan Tengah.

Dalam teori basis ekonomi, setidaknya terdapat 3 pendekatan atau alat analisis yang dapat digunakan untuk menentukan basis ekonomi suatu daerah. Alat analisis tersebut terdiri dari:

- Analisis Shift-Share;
- Analisis Location Quotient (LQ); dan
- Tipology Klassen (Massen Typology).

Analisis Shift-Share

Analisis *Shift-Share* ini digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah relatif terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih tinggi (nasional) sebagai referensi atau acuan;

Perubahan relatif struktur ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi nasional (*national growth effect*), yang menunjukkan bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah;
- Pergeseran proporsional (*proportional shift*), yang menunjukkan perubahan relatif (naik/turun) kinerja suatu sektor di Propinsi Kalimantan Tengah terhadap sektor yang sama nasional. Pergeseran proporsional (*proportional shift*) disebut juga pengaruh bauran industri (*industry mix*); dan
- Pergeseran diferensial. (*differential shift*), yang menunjukkan tingkat ke-kompetitifan suatu sektor tertentu di Propinsi Kalimantan Tengah dibanding nasional. Jika nilai pergeseran diferensialnya positif, berarti sektor

tersebut di Propinsi Kalimantan Tengah lebih kompetitif dibanding sektor yang sama di tingkat perekonomian nasional. Pergeseran diferensial ini disebut juga pengaruh keunggulan kompetitif.

Formula yang digunakan untuk menggunakan analisis *shift-share* ini adalah sebagai berikut:

- Dampak nyata pertumbuhan ekonomi daerah:
(1) $D_{ij} = N_{ij} + M_{ij} + C_{ij}$ atau $D_{ij} = E_{ij}^* - E_{ij}$
- Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional:
(2) $N_{ij} = E_{ij} \times r_n$
- Pergeseran proporsional (*proportional shift*) atau pengaruh bauran industri:
(3) $M_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_n)$
- Pengaruh Keunggulan Kompetitif:
(4) $C_{ij} = E_{ij} (r_{ij} - r_{in})$

Di mana: E_{ij} adalah kesempatan kerja di sektor i daerah j, E_{in} adalah kesempatan kerja di sektor i nasional, r_{ij} adalah laju pertumbuhan sektor i di daerah j, r_{in} adalah laju pertumbuhan sektor I nasional dan r_n adalah laju pertumbuhan ekonomi nasional, Tanda “*” menunjukkan data di akhir tahun analisis.

Analisis Location Quotient (LQ)

Dengan analisis ini, pertama-tama secara arbiter menentukan sektor-sektor ke dalam kategori ekspor (misalnya industri pengolahan dan pertanian) atau ke dalam sektor lokal bukan basis (misalnya listrik, gas dan air minum, perbankan, jasa pemerintah dan sebagainya).

Asumsi yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa jika suatu daerah lebih berspesialisasi dari pada bangsa yang bersangkutan dalam memproduksi suatu produk, maka daerah tersebut akan mengekspor barang tersebut ke daerah lain di dalam negara tersebut. Asumsi lain yang digunakan dalam analisis ini adalah bahwa perekonomian merupakan sebuah perekonomian tertutup.

Rumusan yang digunakan untuk menghitung LQ adalah sebagai berikut:

$$LQ = \frac{V_{ij}/V_j}{V_{in}/V_n}$$

- Di mana: v_{ij} = Nilai tambah (PDRB) sektor i di daerah j;
 v_i = Nilai tambah (PDRB) daerah j;
 v_{in} = Nilai tambah (PDRB) sektor i Nasional (referensi);
 v_i = Nilai tanibah (PDRB) Nasional (referensi);

Berlaku ketentuan, bahwa jika:

- $LQ > 1$: Daerah j lebih berspesialisasi dalam memproduksi sektor i dibandingkan sektor i nasional;
- $LQ < 1$: Daerah j tidak berspesialisasi dalam memproduksi sektor I dibandingkan sektor i nasional;
- $LQ = 1$: Baik daerah j maupun nasional sama derajat spesialisasinya dalam memproduksi sektor i.

Tipologi Klassen

Analisis ini mendasarkan pengelompokkan suatu sektor dengan melihat pertumbuhan dan kontribusi sektor bersangkutan terhadap total PDRB suatu daerah. Dengan menggunakan analisis tipologi Klassen, suatu sektor dapat dikelompokkan ke Dalam 4 kategori utama, yaitu:

- Sektor Prima;
- Sektor Potensial;
- Sektor Berkembang; dan
- Sektor Terbelakang

Penentuan kategori suatu sektor ke dalam keempat kategori di atas didasarkan pada laju pertumbuhan kontribusi sektoralnya dan rerata besar kontribusi sektoralnya pada PDRB, seperti yang ditunjukkan tabel berikut:

Rerata Kontribusi Sektoral pada PDRB	$Y_i \geq Y_{PDRB}$	$Y_i < Y_{PDRB}$
Rerata laju pertumbuhan sektoral		
$r_i \geq r_{PDRB}$	Sektor Prima	Sektor Berkembang
$r_i < r_{PDRB}$	Sektor Potensial	Sektor Terbelakang

Dimana:

- Y_i = Nilai Sektor i;
 Y_{PDRB} = Rata-rata PDRB;
 r_i = Laju pertumbuhan sektor i;
 r_{PDRB} = Laju pertumbuhan PDRB.

A. Analisis Shift-Share

Dengan menggunakan analisis *shift-share* diketahui bahwa selama kurun waktu 1998-2000, PDRB Propinsi Kalimantan Tengah mengalami pertambahan nilai absolut sebesar Rp. 84,02 miliar atau tumbuh hanya sebesar 2,1 persen berdasarkan atas Harga Konstan 1993. Dari jumlah tersebut, ternyata sebesar Rp. 220,98 miliar disebabkan oleh dampak perkembangan sektoral secara nasional. Jumlah ini cenderung berkurang karena terbatasnya sektor-sektor yang kompetitif di propinsi ini, yaitu sebesar Rp. 131,00 miliar dan pengaruh negatif bauran industri sebesar Rp. 5,96 miliar. Dengan kata lain, sumberdaya di propinsi ini cenderung mengalir ke luar daerah.

Sub Sektor ekonomi yang kompetitif (lihat angka C_{ij} yang positif) di Propinsi Kalimantan Tengah ini terdiri dari:

1. Sub sektor tanaman bahan makanan;
2. Sub sektor tanaman perkebunan;
3. Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya;
4. Sub sektor perikanan;

5. Sub Sektor hotel;
6. Sub sektor restoran;

Beberapa sub sektor lain yang memiliki nilai positif dan kompetitif, namun tidak bisa dijadikan sektor kompetitif daerah Propinsi Kalimantan Tengah. Hal ini dikarenakan sektor ini bersifat turunan dari perkembangan sektor-sektor lainnya di daerah.

B. Analisis *Klassen Typology*

Dengan menggunakan analisis *Klassen Typology*, dapat diklasifikasikan masing-masing sub sektor ekonomi daerah sebagai sub sektor yang prima, berkembang, potensial dan terbelakang. Dengan menggunakan alat analisis ini, sub sektor yang bisa dijadikan sektor unggulan bagi daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Klassen Typology Sektor Perekonomian Kalimantan Tengah

No	SEKTOR	KLASSEN TIPOLOGY
1	Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan	PRIMA
	a. Tanaman Bahan Makanan	Berkembang
	b. Tanaman Perkebunan	Berkembang
	c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	Berkembang
	d. Kehutanan	Potensial
	e. Perikanan	Berkembang
4	Listrik, Gas & Air Bersih	BERKEMBANG
	a. Listrik	Berkembang
	b. Air Bersih	Berkembang
6	Perdagangan, Retoran & Hotel	PRIMA
	a. Perdagangan Besar dan Eceran	Prima
	b. Hotel	Berkembang
	c. Restoran	Prima
7	Pengangkutan & Komunikasi	POTENSIAL
	a. Pengangkutan	Potensial
	b. Komunikasi	Berkembang
8	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	BERKEMBANG
	a. Sewa Bangunan	Berkembang
	b. Jasa Perusahaan	Berkembang
	c. Swasta	Berkembang

C. Analisis *Location Quotient (LQ)*

Dengan menggunakan metode LQ, diketahui bahwa di Propinsi Kalimantan Tengah terdapat beberapa sub sektor yang bisa dijadikan sebagai sektor ekonomi basis atau potensial bagi Propinsi Kalimantan Tengah (lihat Tabel 2.9.).

Sub sektor basis tersebut terdiri dari:

- Sub sektor tanaman perkebunan;
- Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya;
- Sub sektor kehutanan; (sub sektor kehutanan nampaknya merupakan sub sektor yang perlu dikelola secara hati-hati. Hal ini terlihat dari angka LQ yang cenderung semakin rendah, bukan termasuk sub sektor yang kompetitif (dalam analisis *shift-share*) dan termasuk dalam kategori sektor yang potensial (tipologi *Klassen*). Hal ini berarti bahwa sub sektor ini cenderung semakin menurun pertumbuhannya, walaupun dari sisi kontribusinya sektor ini masih cukup dominan).
- Sub sektor perikanan;
- Sub sektor perdagangan besar dan eceran; dan
- Sub sektor pengangkutan.

Dengan menggunakan ketiga metode analisis ini, dapat disimpulkan bahwa beberapa sub sektor yang dapat dijadikan sebagai sektor basis atau sektor unggulan daerah adalah:

1. Sub sektor tanaman perkebunan;
2. Sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya;
3. Sub sektor kehutanan;
4. Sub sektor perikanan;
5. Sub sektor perdagangan besar dan eceran;

Dengan kata lain, basis pengembangan ekonomi daerah didasarkan atas pengembangan sektor-sektor basis tersebut dan akan berdampak pada sektor-sektor turunan yang terkait langsung dengan pengembangan sub sektor basis tersebut.

NO.	SEKTOR	ANALISIS SHIFT SHARE				LOCATION QUOTIENT		KLASSEN TYPOLOGY		
		N _{ij}	M _{ij}	C _{ij}	D _{ij}	LQ 1998	LQ 2000			
1	PERTANIAN, PETERNAKAN, KEHUTANAN & PERIKANAN	a. Tanaman Bahan Makanan	83,95	(16,33)	56,39	124,01	2,32	2,43	Berkembang	
		a. Tanaman Perkebunan	11,12	(4,41)	134,90	145,38	2,49	0,75	Berkembang	
		c. Peternakan dan Hasil-hasilnya	3,29	2,46	15,86	21,62	0,90	0,75	Berkembang	
		d. Kehutanan	46,88	(68,86)	133,461	131,44	12,50	0,75	Potensial	
		a. Perikanan	7,76	13,44	27,98	27,98	2,32	0,75	Berkembang	
		a. Minyak dan Gas Bumi	8,04	(8,44)	23,99	23,99	1,34	0,75	Terbelakang	
		a. 6,89	3,50	21,79	21,80	1,52	0,75	Terbelakang		
		c. Penggalian	1,15	0,05	3,36	(2,19)	0,45	0,75	Terbelakang	
		3	INDUSTRI PENGOLAHAN	19,41	13,07	63,58	(31,20)	0,32	0,75	Terbelakang
		a. Industri Migas	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL
b. Industri Tanpa Migas	19,41	17,13	59,74	(31,20)	0,40	0,34	Terbelakang			
d. Listrik, Gas dan Air Bersih	0,83	1,84	3,93	6,60	0,26	0,32	Berkembang			
a. Listrik	0,71	1,67	2,90	5,28	0,27	0,33	Berkembang			
b. Gas Kola	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL		
c. Air Bersih	0,11	0,16	1,04	1,32	0,25	0,37	Berkembang			
5	BANGUNAN	11,86	0,83	(48,08)	(35,40)	0,93	0,75	Terbelakang		
a. Perdagangan Besar dan Eceran	37,08	(0,35)	(17,37)	19,36	1,36	1,37	1,20	Prima		
b. Hotel	0,77	0,26	0,54	1,57	0,54	0,58	0,58	Berkembang		
c. Restoran	2,65	0,77	2,27	5,70	0,48	0,51	0,51	Potensial		
7	PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	14,72	4,58	(33,79)	7,51	1,73	1,67	1,67	Potensial	

Analisis Shift-Share, Location Quotient (LQ) dan Typology Klassen
Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah, Tahun 1998 dan 2000

Tabel 2.9.

RENCANA STRATEGIS DAERAH (RENSTRADA)
PROPINSI KALIMANTAN TENGAH 2003-2005

NO.	SEKTOR	ANALISIS SHIFT SHARE				LOCATION QUOTIENT		KLASSEN TYPOLOGY
		N _{ij}	M _{ij}	C _{ij}	D _{ij}	LQ 1998	LQ 2000	
a.	Pengangkutan	25,86	(4,64)	(15,21)	6,00	2,21	2,22	Potensial
	-Pengangkutan Kereta Api	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL	DTL
	-Pengangkutan Jalan Raya (Darat)	5,63	(6,24)	22,20	21,58	0,90	1,13	Berkembang
	-Pengangkutan Laut, Sungai, Danau & Penyeberang	18,20	29,23	(64,70)	(17,28)	7,86	6,73	Terbelakang
	-Pengangkutan Udara	0,24	(0,41)	0,47	0,30	0,34	0,39	Berkembang
	-Jasa Penunjang Pengangkutan	1,79	1,49	(1,89)	1,40	0,80	0,79	Berkembang
	b. Komunikasi	0,72	2,07	(1,29)	1,50	0,19	0,19	Berkembang
8	KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	5,13	(8,19)	6,83	3,77	0,32	0,36	Berkembang
a.	Bank	0,70	(1,90)	0,32	(0,88)	0,12	0,13	Terbelakang
b.	Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa Penunjang Keuangan	0,71	(0,02)	(1,44)	(0,75)	0,43	0,39	Terbelakang
c.	Sewa Bangunan	3,60	(5,47)	7,06	5,19	0,67	0,77	Berkembang
d.	Jasa Perusahaan	0,11	(0,06)	0,15	0,20	0,04	0,04	Berkembang
9	JASA-JASA	24,68	(5,83)	(12,76)	6,09	1,19	1,19	Terbelakang
a.	Pemerintahan Umum dan Pertahanan	21,17	(9,45)	(11,72)	-	1,70	1,70	Terbelakang
b.	Swasta	3,51	0,28	2,31	6,09	0,42	0,45	Berkembang
1.	Jasa Sosial dan Kemasyarakatan	1,89	1,36	(2,04)	1,21	1,32	1,29	Berkembang
2.	Jasa Hiburan dan Budaya	0,06	(0,06)	0,36	0,36	0,14	0,20	Berkembang
3.	Jasa Perorangan dan Rumah Tangga	1,57	0,01	2,96	4,53	0,24	0,27	Berkembang

Sumber data: Diolah dari data Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Keterangan: DTL = Data Tidak Lengkap

2.3.3 Proyeksi Perkembangan Ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah

Berapakah PDRB Propinsi Kalimantan Tengah dalam kurun waktu berlakunya Rencana Strategik Daerah Propinsi Kalimantan Tengah ini? Pertanyaan ini hanya dapat dijawab dengan proyeksi dengan menggunakan asumsi-asumsi tertentu. Sebelum sampai pada hasil proyeksi, beberapa kendala yang dihadapi dalam proyeksi ini adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan data yang sangat minim. Untuk hasil proyeksi yang lebih baik, idealnya dibutuhkan data historis dalam rentang waktu yang cukup panjang tentang PDRB harga dasar konstan, berikut data historis tentang variabel-variabel yang mempengaruhinya.
2. Rentang waktu proyeksi yang cukup panjang, yaitu dalam rentang waktu 5 tahunan. Secara teoritis, semakin panjang rentang waktu proyeksi, maka semakin tinggi tingkat kesalahan hasil proyeksi tersebut.

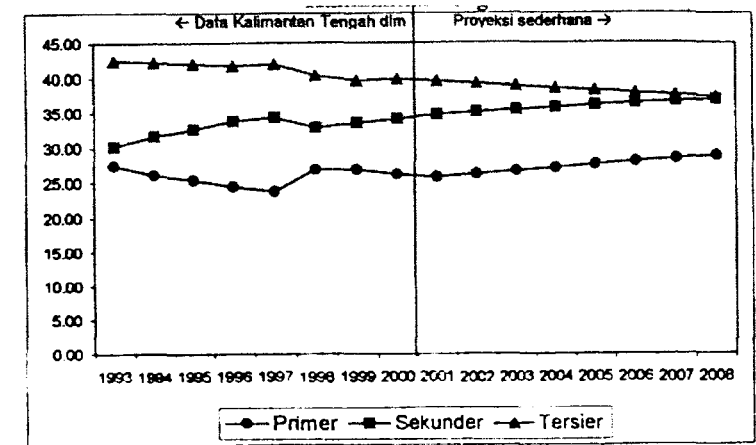
Berdasarkan kedua hal di atas, maka hasil proyeksi yang akan disajikan harap digunakan secara berhati-hati.

Model proyeksi yang akan diketengahkan di sub bab ini adalah model proyeksi regresi dua variabel sederhana; tahun sebagai variabel independen dan sumbangan sektoral sebagai variabel dependen. Hasil proyeksi sektoral hingga tahun 2005 adalah seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.10 di bawah. Sedangkan hasil proyeksi kontribusi sektor-sektor primer, sekunder dan sektor tersier, adalah seperti yang ditunjukkan grafik 2.4. di bawah.

Dari hasil proyeksi yang ditunjukkan pada tabel dan grafik di bawah terlihat bahwa dominasi kontribusi sektor tersier masih relatif tinggi, yang disusul oleh sektor sekunder. Sedangkan kontribusi sektor primer masih tetap rendah. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi pada interval data awal, tetapi juga terjadi pada interval data hasil proyeksi, yaitu mulai tahun 2002 hingga tahun 2008. Namun

demikian, trendnya adalah kontribusi sektor primer cenderung meningkat, sedangkan kontribusi sektor tersier cenderung menurun.

Bagan 2.4.
Proyeksi Perkembangan Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier Perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah



Catatan khusus perlu diberikan pada sektor primer, yang terdiri dari lapangan usaha Pertanian dan Pertambangan. Selama ini, penyerapan tenaga kerja di sektor primer masih sangat tinggi, sedangkan kontribusi sektor primer tersebut pada PDRB masih relatif rendah. Kenyataan bahwa sebahagian besar (57%) penduduk berumur 10 tahun ke atas bekerja di sektor Pertanian, sedangkan sektor yang penyerapan tenaga kerjanya relatif rendah adalah sektor Keuangan, yang hanya menyerap 2% angkatan kerja yang ada di Propinsi Kalimantan Tengah. Fakta-fakta ini mengindikasikan bahwa produktivitas sektor primer di Propinsi Kalimantan Tengah ini masih sangat rendah. Dengan asumsi bahwa hal-hal lain di anggap konstan, rendahnya produktivitas sektor primer ini akan berlanjut hingga tahun 2008.

Untuk meningkatkan sektor primer ini, kebijakan pembangunan daerah harus dapat mengantisipasinya secara baik. Untuk meningkatkan produktivitas sektor primer ini, pengaitan sektor primer dengan sektor sekunder masih perlu dikembangkan terus. Penguatanketerkaitan (*linkages*) berarti bahwa output sektor primer clikelola dan ditingkatkan nilai tambahnya oleh sektor sekunder di wilayah Propinsi Kalimantan Tengah. Sebaliknya, apa yang dihasilkan oleh sektor sekunder dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produktivitas sektor primer. Bila keterkaitan sektoral ini dapat ditingkatkan, otomatis kemandirian daerah dalam peningkatan kesejahteraan rakyatnya terbangun di atas pondasi yang kuat. Hal ini sedemikian, karena Propinsi Kalimantan Tengah masih merupakan wilayah yang kaya akan sumberdaya alam.

Dalam Propeda, upaya-upaya pengaitan sektor primer dengan sektor sekunder ini sudah teridentifikasi secara baik. Beberapa diantaranya adalah pengembangan pertanian, pangan dan perairan; program pengembangan sisteni ketahanan pangan; pengembangan dan pengelolaan pengairan; pengembangan lapangan usaha agribisnis; pemberdayaan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi. pengembangan kewirausahaan PKMK berkeunggulan kompetitif, penguatan pembiayaan/permodalan. Selanjutnya, program-program tersebut juga didukung oleh program penciptaan iklim usaha yang konklusif, kompetitif dan non diskriminatif.

Tabel 2.10.
Hasil Proyeksi Model Sederhana Kontribusi Sektoral
Harga Dasar Konstan 1993 Perekonomian Propinsi
Kalimantan Tengah

No	Sektor	Tahun				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Pertanian	66702.80	68755.36	6980.91	70860.46	71913.02
2	Pertambangan dan Penggalian	39457.33	40230.15	41002.98	41775.80	42548.63
3	Industri Pengolahan	111705.01	115498.15	119291.30	123084.44	126877.59
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	7518.93	7638.31	8117.70	8597.08	9076.46
5	Bangunan	25366.69	25048.79	24730.90	24413.00	24095.10
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	66104.30	66742.04	67379.79	68017.54	68655.28
7	Pengangkutan dan Komunikasi	30277.12	30886.45	31495.79	32105.12	32714.46
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	28941.07	28400.05	27859.02	27318.00	26776.97
9	Jasa-jasa	38920.55	39534.41	40148.27	40762.13	41375.98
	Produk Domestik Bruto	415633.69	422733.60	429833.52	436933.43	444033.35

Sumber data : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001, yang telah diproyeksikan oleh Tim PSE-KP-UGM, Tahun 2002.

Bila Rencana Strategik Daerah ini dilaksanakan berapakah pertumbuhan ekonomi Propinsi Kalimantan Tengah? Pertanyaan ini pun menyangkut proyeksi, dalam hal ini proyeksi hubungan korelasi antara PDRB Propinsi Kalimantan Tengah dengan nilai APBD Propinsi Kalimantan Tengah. Walaupun cara seperti ini tidak sempurna, tetapi untuk alasan praktis, dapat digunakan untuk memperkirakan pertumbuhan PDRB Propinsi Kalimantan Tengah.

Untuk proyeksi PDRB berdasarkan besar kecilnya pengeluaran pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, di bagian ini akan didefinisikan:

$$IC_{\text{Pengeluaran Pemerintah Prop. Kalteng}} \text{ OR} = \frac{\Delta PDRB_{\text{Kaltengatasdasarharga}}}{\Delta \text{Pengeluaran Pemerintah Prop. Kalteng}}$$

Nilai dari $IC_{\text{Pengeluaran Pemerintah Propinsi Kalteng}}$ OR di atas akan diestimasi dengan model regresi dimana PDRB sebagai variabel dependen sedangkan pengeluaran pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah sebagai variabel independen. Agar hasil yang didapat lebih baik, maka beberapa lag dari variabel pengeluaran pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah akan diikutkan. Cara seperti ini biasa dilakukan untuk menghindari masalah autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Setelah dilakukan estimasi, ternyata bahwa dalam rentang waktu 1983 hingga 2001, nilai $IC_{\text{Pengeluaran Pemerintah Propinsi Kalteng}}$ OR relatif cukup besar, yaitu 2,04. Artinya, setiap ada tambahan Rp 1 dalam pengeluaran pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, maka akan ada tambahan Rp 2,04 dalam PDRB harga konstan. Propinsi Kalimantan Tengah. Bila nilai APBD tahun 2003 tetap sebesar nilai APBD 2000/2001, yaitu sebesar Rp 295.574.600.000, maka pada tahun 2003 akan ada pertambahan PDRB Propinsi Kalimantan Tengah (atas dasar harga konstan) sebesar Rp 604.106.599.315. Hasil perkiraan di atas harus digunakan secara berhati-hati, karena pada kenyataannya banyak variabel yang saling terkait dalam menentukan perkembangan PDRB Propinsi Kalimantan Tengah, selain variabel pengeluaran pemerintah. Bila digunakan sebagai dasar penetapan target kinerja pertumbuhan PDRB, cara ini masih dapat digunakan.

Dengan memperhatikan hasil proyeksi di atas, apakah ada indikasi kuat yang menggambarkan perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah? Secara tidak langsung, perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dari indikasi perkembangan kontribusi sektoral, di tiap sektor-sektor PDRB. Dengan asumsi hal-hal lain dianggap konstan, perkembangan kontribusi sektoral PDRB akan mendorong perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah.

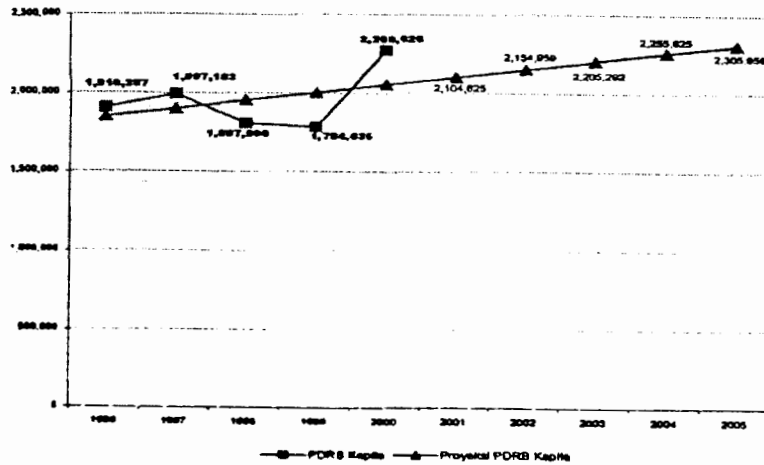
Secara sistematis indikasi perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat dengan menganalisis perkembangan PDRB perkapita ADHK 1993 Propinsi Kalimantan Tengah. Sebelum sampai pada proyeksi perkembangan PDRB perkapita, beberapa catatan yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut. Pemisahan proyeksi kontribusi sektoral seperti yang diuraikan di bagian atas perlu dipisahkan dengan proyeksi Perkembangan pendapatan perkapita. Hal ini sedemikian karena:

- Proyeksi kontribusi sektoral di bagian atas pada dasarnya hanya digunakan untuk memperkirakan dinamika sektoral dari perekonomian Propinsi Kalimantan Tengah.
- Pada dasarnya, mengikutsertakan variabel konsumsi pemerintah, pertambahan penduduk dan luas panen, bersama-sama dengan variabel tahun sebagai variabel independen untuk memperkirakan perkembangan variabel dependen, PDRB, adalah sangat beresiko. Bilapun dapat dipaksakan, tetapi hasil yang didapat akan cukup bias karena model regresi proyeksi menghadapi masalah multikolinearitas tinggi. Ketika masalah multikolinearitas ini tidak dihiraukan, maka koefisien regresi variabel pertambahan penduduk, pengeluaran pemerintah, luas panen, serta koefisien variabel tahun akan cenderung tidak terhingga.
- Pada model proyeksi kontribusi sektoral seperti yang diuraikan di bagian atas, prinsip utama yang digunakan adalah prinsip parsimoni atau kesederhanaan untuk tujuan praktis penyusunan kebijakan. Karena variabel. Konsumsi pemerintah, pertambahan penduduk dan luas panen cenderung bertambah seiring dengan perkembangan waktu, maka dalam model proyeksi kontribusi sektoral di bagian atas, dinamika pada ketiga variabel tersebut diasumsikan sudah terwakili dalam variabel tahun.

Dengan memperhatikan catatan-catatan di atas, proyeksi sederhana dari perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah adalah seperti yang ditunjukkan pada bagan 2.5 di bawah ini.

Bagan 2.5.

Proyeksi Perkembangan PDRB Kapita Masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah



Ket : Model Proyeksi: PDRB Per Kapita ADHK 1993 = Konstanta + bTahun

Dari hasil proyeksi diketahui bahwa kecenderungan perkembangan pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah adalah meningkat. Pada model proyeksi yang tidak disajikan secara khusus di laporan ini, rerata perkembangan pendapatan perkapita riil masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 50.334,14 rupiah per tahunnya. Di tahun 2005, rerata pendapatan perkapita masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp. 2.305.958 rupiah. Bila angka ini dijadikan target kinerja, maka penggalakan usaha-usaha produktif yang memanfaatkan kekayaan sumberdaya alam menjadi sangat penting artinya.

2.4. KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Belajar dari pengalaman serta perkembangan pemikiran tentang pembangunan dari berbagai belahan dunia telah memberikan inspirasi konseptual tentang perlunya paradigma pembangunan baru yang tidak hanya menunjukkan sisi materil (*output*) atau GNP yang dihasilkan oleh suatu agregasi komunitas tapi juga kemajuan-kemajuan yang terkait dengan sisi harkat kesejahteraan kemanusiaan komunitas tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, *United Nation Development Programme* (UNDP) sebuah lembaga PBB yang berkecimpung di bidang pemikiran dan asistensi teknis pembangunan negara duani ketiga, pada tahun 1990 memperkenalkan konsep baru mengenai pembangunan berorientasi manusia (*Human Development Centre*) seraya mulai mempublikasikan laporan reguler tahunan (*Global Human Deveelopment Report*) yang mendiskripsikan kemajuan pembangunan yang berorientasi pada manusia secara global.

Sesuai dengan definisi yang diberikan pada *Global Human Development Report 1990*, pembangunan yang berorientasi pada manusia memberikan tifik fokus pada perluasan pilihan masyarakat untuk hidup lebih lama dan sehat, berpengetahuan serta mempunyai akses terhadap standar hidup yang layak, yang diukur dengan *Human Development Index* (HDI) yang selanjutnya disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta *Poverty Index* yang selanjutnya disebut indeks kemiskinan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengkombinasikan tiga komponen indikator, yaitu;

1. Indikator kesehatan masyarakat yang diukur dengan tingkat harapan hidup (*life expectancy at birth*) yang dinyatakan dengan satuan tahun,
2. Indikator pendidikan yang diukur dengan rata-rata lama tahun sekolah masyarakat dan persentase tingkat melek huruf orang dewasa,
3. Indikator kesejahteraan masyarakat diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan dengan daya beli masyarakat (*purchasing power parity*), dan dinyatakan dengan ukuran mata uang Rupiah.

Sedangkan Indeks kemiskinan (*Poverty Index*) mengkombinasikan beberapa dimensi kemiskinan yang diduga sangat berpengaruh terhadap memburuknya kualitas hidup masyarakat terkait dengan penyediaan pelayanan publik yang harus disediakan oleh sektor publik (pemerintah), beberapa indikator yang digunakan adalah ;

1. Indikator keterbelakangan kesehatan yang diukur dengan persentase masyarakat yang tidak bisa eksis sampai umur 40 tahun (*people not expected to survive age 40*)
2. Indikator keterbelakangan pendidikan yang diwakili oleh tingkat/persentase buta huruf pada orang dewasa (*Adult illiteracy rate*),
3. Indikator ketidaksejahteraan (kemelaratan) masyarakat diukur dengan; (a) persentase populasi yang tidak mempunyai akses terhadap air bersih, (b) persentase penduduk yang tidak punya akses terhadap pelayanan kesehatan dan (c) persentase balita yang berstatus kekurangan gizi.

Berdasarkan konsep *Human Development* yang telah disebutkan diatas, Bappenas bekerjasama dengan BPS dan perwakilan UNDP di hidonesia telah menyusun laporan reguler tahunan *Indonesia Human Development Report* yang memotret kemajuan pembangunan yang berorientasi manusia di seluruh daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia. Selanjutnya status kemajuan pembanguan yang berorientasi pada manusia di Kalimantan Tengah pada akhir tahun 1999 dibahas pada sub-bab berikut ini.

2.4.1 Indeks, Pembangunan Manusia (IPM)

Secara umum, tingkat kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Tengah berada diatas rata-rata tingkat kesejahteraan nasional baik pada tahun 1996 maupun tahun 1999 yang ditunjukkan dengan lebih tingginya angka IPM Propinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan rata-rata angka indeks nasional. Namun demikian selama periode

1996-1999 telah terjadi penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat Propinsi Kalimantan Tengah yang ditunjukkan dengan penurunan angka indeks pembangunan manusia (IPM) baik di tingkat propinsi maupun kabupaten/kota Kalimantan Tengah. Pada tingkat propinsi IPM yang pada tahun 1996 telah mencapai angka 71,3 mengalami penurunan sebesar 6,5 persen menjadi 66,7 pada tahun 1999. Tabel 2.11.

Tabel 2.11.
Skor IPM Komponen Pembentukan di Propinsi Kalimantan Tengah Serta Kabupaten/Kota, Tahun 1996 dan 1999

Sumber Data : *Indonesia Human Development Report 2001*

No	Uraian	Tingkat Harapan Hidup (THN)		Tingkat Melek Huruh (%)		Rata-rata Lama Sekolah (THN)		Pendapatan Perkapita Disesuaikan (Rp.000)		Skor IPM		Rangking IPM Nasional	
		1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999	1996	1999
1.	Kota Palangkaraya	71.2	72.1	98.7	98.1	9.8	9.8	585.8	582.2	76.9	72.3	2	6
2.	Kab. Barito Utara	69.4	70.3	94.1	95.4	6.2	6.7	561.1	569.2	70.3	67.4	65	65
3.	Kab. Kotawaringin Barat	68.4	69.4	90.7	93.1	6.5	6.7	571.5	577.6	70.0	67.1	69	71
4.	Kab. Kotawaringin Timur	67.0	67.9	92.8	93.4	6.1	6.8	575.5	563.6	69.7	65.3	77	111
5.	Kab. Barito Selatan	65.2	66.1	95.9	96.7	6.7	7.1	570.4	571.9	69.4	65.9	83	97
6.	Kab. Kapuas	68.6	69.6	93.2	95.0	6.2	6.6	555.8	571.5	69.2	67.1	86	73
	Propinsi Kalteng	68.3	69.2	93.7	94.8	6.6	7.1	578.9	565.4	71.3	66.7	5	7
	Rerata Nasional	64.4	66.2	85.5	88.4	6.3	6.7	587.4	578.8	67.7	64.3		

Sejalan dengan penurunan angka IPM tersebut, peringkat IPM Propinsi Kalimantan Tengah juga mengalami penurunan relatif dibandingkan dengan propinsi lain secara nasional. Pada tahun 1996 ranking IPM Propinsi Kalimantan Tengah menempati urutan ke 5 (lima) dari sebanyak 25 propinsi di Indonesia yang kemudian menurun menjadi urutan ke 7 (tujuh) pada tahun 1999.

Penurunan peringkat IPM Propinsi tersebut selanjutnya dapat dijelaskan dari variasi peningkatan dan penurunan

peringkat IPM beberapa Kabupaten/Kota yang ada di Kalimantan Tengah Selama periode 1996-1999, hampir semua kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat terkecuali Kabupaten Kapuas dan Barito Utara. Pada tahun 1996, Kabupaten Kapuas menempati urutan ke 86 dari 295 daerah kabupaten/kota di Indonesia yang kemudian meningkat menjadi urutan ke 73 nasional pada tahun 1999, sedangkan Kabupaten Barito Utara tidak mengalami perubahan peringkat yaitu tetap berada di urutan 65 nasional pada tahun 1996 dan 1999.

Pengamatan lebih jauh terhadap perkembangan masing-masing indeks komponen pembentuk IPM di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah selama periode 1996-1999, selanjutnya diuraikan dalam poin-poin berikut ini;

Tingkat Harapan Hidup (*Life Expectancy at Birth*)

Selama periode 1996-1999 telah terjadi peningkatan tingkat kesehatan masyarakat baik pada tingkat Propinsi maupun seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah. Tingkat harapan hidup yang pada tahun 1996 mencapai 68,3 tahun meningkat sebesar 1,3 persen menjadi 69,2 tahun pada tahun 1999.

Capaian tingkat harapan hidup masyarakat Kalimantan Tengah tersebut juga lebih baik dibandingkan dengan rata-rata tingkat harapan hidup nasional yang pada tahun 1996 mencapai 64,4 tahun dan 66,2 tahun pada tahun 1999.

Tingkat Melek Huruf (*Adult Literacy Rate*)

Selama periode 1996-1999 telah terjadi peningkatan jumlah tingkat melek huruf baik pada tingkat propinsi maupun kabupate/kota yang ada di propinsi Kalimantan Tengah. Pada tahun 1996 persentase penduduk yang melek huruf mencapai 93,7 persen yang meningkat menjadi 94,8

persen pada tahun 1999.

Capaian angka melek huruf di propinsi Kalimantan Tengah ini juga melampaui rata-rata tingkat melek huruf nasional yang pada tahun 1996 mencapai 85,5 persen dan sebesar 88,4 persen pada tahun 1999.

Rata-rata Lama sekolah (*Mean Years of Schooling*)

Selama periode 1996-1999 juga telah terjadi peningkatan rata-rata lamanya masyarakat menikmati pendidikan, baik pada tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota di Kalimantan tengah. Pada tahun 1996 rata-rata lama penduduk menikmati lamanya pendidikan mencapai 6,6 tahun yang meningkat pada tahun 1999 menjadi 7,1 tahun.

Capaian rata-rata lama masyarakat mengenyam pendidikan Propinsi Kalimantan Tengah ini juga melampaui rata-rata nasional yang pada tahun 1996 tercatat selama 6,3 tahun yang meningkat menjadi selama 6,7 tahun pada tahun 1999.

Pendapatan Perkapita (*Adjusted Real Percapita Expmditure*)

Krisis ekonomi nasional yang melanda Indonesia semenjak tahun 1997 lalu diduga telah ikut berpengaruh terhadap merosotnya daya beli masyarakat Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan dengan penurunan pengetuaran perkapita *purchasing power parity* Propinsi Kalimantan Tengah yang pada tahun 1996 mencapai nilai nominal Rp.578,900-' yang merosot menjadi sebesar Rp.565,400-'pada tahun 1999.

Catatan lain yang perlu diperhatikan disini adalah pengeluaran perkapita *purchasing power parity* Propinsi Kalimantan Tengah masih berada dibawah rata-rata pengeluaran per-kapita nasional yang pada tahun 1996 mencapai nilai nominal sebesar 587,4002 dan sebesar Rp.578.8002 pada tahun 1999.

2.4.2 Indeks Kemiskinan (IK)

Secara umum, angka indeks kemiskinan Propinsi Kalimantan Tengah pada tahun 1999 mengindikasikan bahwa Propinsi ini tidak mempunyai permasalahan kemiskinan yang terlalu berat jika dibandingkan dengan propinsi lain di Indonesia, hal ini ditunjukkan dengan capaian angka indeks yang hanya mencapai nilai 29,0 jauh lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka indeks nasional yang pada tahun 1999 mencapai nilai 59,1.

Perbandingan indeks kemiskinan antara Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa angka indeks tertinggi terdapat di Kabupaten Barito Utara yang pada tahun 1999 menempati urutan ke 21 dari 295 daerah Kabupaten/Kota di Indonesia, kemudian Kabupaten Barito Utara menempati urutan 32 nasional, diikuti kabupaten Kotawaringin Timur yang menempati urutan 75 nasional, Kabupaten Kapuas menempati urutan ke 90 nasional, Kota Palangkaraya menempati urutan 172 nasional dan terakhir Kabupaten Kotawaringin Barat yang menempati urutan ke 223 nasional.

Tabel 2.12.
Indeks Kemiskinan (IK) dan Komponen Pembentuknya
pada Tingkat Propinsi serta Kabupaten/Kota di Propinsi
Kalimantan Tengah, 1999

No	Keterangan	% Populasi yang tidak bisa eksis S/D Umur 40 thn	% Buta Huruf Pada Orang Dewasa	% Populasi yang tidak punya Akses Terhadap Air Bersih	% Populasi yang tidak punya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan	% Balita Kekurangan Gizi	IK	Ranking IK Nasional Dan Daerah
1	Kab. Barito Selatan	15.1	3.3	55.5	42.7	51.7	35.0	32(2)
2	Kab. Barito Utara	8.9	4.7	73.1	60.8	23.6	36.5	21(1)
3	Kota Palangkaraya	6.7	1.9	71.3	0.5	34.2	24.6	172(5)
4	Kab. Kapuas	9.9	5.0	71.4	31.6	26.8	30.1	90(4)
5	Kab. KOTIM	12.2	6.6	80.5	22.5	30.9	31.2	75(3)
6	Kab. KOBAR	10.2	6.9	40.6	26.2	22.2	20.9	223(6)
	Propinsi Kalteng	10.4	5.2	68.2	26.2	30.5	29.0	20
	Rata-rata Nasional	18.3	15.2	14.4	16.6	53.1	51.9	

Sumber Data : *Indonesia Human Development Report 2001*

Pengamatan lebih jauh mengenai capaian masing-masing indikator komponen pembentuk Indeks Kemiskinan di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota Kalimantan Tengah selanjutnya diuraikan kedalam poin-poin berikut ini;

Populasi yang diperkirakan tidak bisa eksis sampai dengan umur 40 tahun

Pada tahun 1999, masih terdapat sebanyak 10,4 persen Penduduk Propinsi Kalimantan Tengah yang diperkirakan tidak bisa eksis sampai umur 40 tahun yang disebabkan oleh buruknya kualitas kesehatan, namun demikian angka tersebut masih jauh lebih kecil dengan angka rata-rata daerah lain secara nasional yang pada tahun 1999 mencapai sebesar 18,3 persen dari jumlah penduduk.

Pada tingkat kabupaten, sebaran prosentase penduduk yang diperkirakan tidak bisa eksis sampai umur 40 thn, masing-masing menurut urutannya adalah ; sebanyak 15,1 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Barito Selatan, sebanyak 12,2 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, sebanyak 10,2 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin barat, sebanyak 9,9 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Kapuas, sebanyak 8,9 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara serta sebanyak 6,7 persen dari jumlah penduduk Kota Palangkaraya.

Tingkat Buta Huruf Pada Orang Dewasa

Secara keseluruhan, pada tahun 1999 masih terdapat sejumlah 5,2 persen dari penduduk Kalimantan Tengah yang belum tuntas dari masalah buta huruf. Namun demikian angka ini jauh lebih baik daripada angka rata-rata prosentase buta huruf nasional yang mencapai angka 15,2 persen dari jumlah penduduk dewasa.

Perbandingan antar Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa angka buta huruf tertinggi terdapat di Kabupaten Ko-

tawaringin Barat yang mencapai angka 6,9 persen dari jumlah penduduk dewasa, Kemudian Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencapai sebesar 6,6 persen, Kabupaten Kapuas sebesar 5 persen, Kabupaten Barito, Utara sebesar 4,7 persen, Kabupaten Barito Selatan 3,3 persen dan terakhir Kota Palangkaraya sebesar 1,9 persen dari jumlah penduduk dewasa.

Persentase Populasi yang Tidak punya Akses Terhadap Air Bersih

Secara umum, pada tahun 1999 terdapat sebanyak 68 % dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, angka tersebut jauh lebih buruk dari angka rata-rata daerah secara nasional yang hanya sebesar 14,1 persen dari jumlah penduduk.

Perbandingan antar Kabupaten di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa daerah yang paling mengalami kesulitan dalam akses terhadap air bersih ini adalah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk yang mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih mencapai angka sebesar 80 persen, kemudian Kabupaten Barito Utara sebesar 73,1 persen, Kabupaten Kapuas sebesar 71A persen, Kota Palangkaraya 71,3 persen, Kabupaten Barito Selatan sebesar 55,5 persen dan terakhir Kabupaten Kotawaringin Barat yang mencapai sebesar 40,6 persen dari jumlah penduduk.

Persentase Populasi yang tidak Punya Akses Terhadap Pelayanan Kesehatan

Secara umum, pada tahun 1999 masih terdapat sebanyak 26,2 persen dari jumlah penduduk Kalimantan Tengah yang tidak mempunyai akses terhadap pelayanan kesehatan. Angka tersebut jauh lebih buruk daripada kondisi

rata-rata nasional yang pada tahun 1999 hanya mencapai angka sebesar 11,6 persen.

Sedangkan perbandingan antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa daerah yang paling parah mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan ini adalah Kabupaten Barito Utara yang pada tahun 1999 sebesar 60,8 persen dari jumlah penduduknya mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan. Kemudian Kabupaten Barito Selatan sebesar 42,7 persen, Kabupaten Kapuas sebesar 31,6 persen, Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 26,2 persen, Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 22,5 persen dan terakhir Kota Palangkaraya yang hanya 0,5 persen dari jumlah penduduknya yang mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Tingkat Kekurangan Gizi pada Balita

Secara umum, pada tahun 1999 terdapat sebanyak 30,5 persen jumlah balita Propinsi Kalimantan Tengah yang mengalami kekurangan gizi. Namun demikian, angka tersebut jauh lebih baik daripada kondisi nasional yang pada tahun 1999 mencapai angka rata-rata sebesar 53.1 persen.

Sedangkan perbandingan antar kabupaten/kota di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa daerah yang paling buruk kondisi gizi balitanya adalah Kabupaten Barito Selatan yang pada tahun 1999 prosentase kekurangan gizi pada balitanya mencapai angka 51,7 persen dari jumlah balita, kemudian diikuti oleh Kota Palangkaraya sebesar 34,2 persen, Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 30,9 persen, Kabupaten Kapuas sebesar 26,8 persen. Kabupaten Barito Utara 23,6 persen dan terakhir Kabupaten Kotawaringin Barat sebesar 22,2 persen.

2.4.3 Profil Umum Prasarana, Sumberdaya Manusia Kesehatan

Beberapa prasarana kesehatan utama yang keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap keluasan cakupan pelayanan relatif tersebar secara merata di 6 wilayah kabupaten/kota Propinsi Kalimantan Tengah, masing-masing meliputi; sebanyak 10 unit rumah sakit, sebanyak 135 unit puskesmas, sebanyak 700 unit puskesmas pembantu dan sebanyak 7 unit rumah bersalin.

Tabel 2.13.
Prasarana Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah, 2001

KETERANGAN	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Rumah Bersalin
Kab. Barito Selatan	2	17	90	-
Kab. Barito Utara	2	19	104	1
Kota Palangkaraya	1	7	38	3
Kab. Kapuas	2	39	184	-
Kab. KOTIM	2	35	170	1
Kab. KOBAR	18	122	2	
Propinsi Kalteng	10	135	770-8	7

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Sedangkan sumberdaya manusia yang bekerja pada berbagai bidang kesehatan di Kalimantan Tengah meliputi sebanyak 2815 orang dengan rincian profesi adalah; sebanyak 191 orang bidan, sebanyak 46 orang dokter gigi, sebanyak 761 orang bidan, sebanyak 1791 orang pengatur rawat, 17 orang apoteker dan sebanyak 9 orang tenaga teknis.

Tabel 2.14.
Sumber Daya Manusia Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah, 2001

KETERANGAN	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Pengatur Rawat	Apoteker	Tenaga Teknis	Jumlah
Kab. Barito Selatan	24	5	84	234	2	1	350
Kab. Barito Utara	23	5	179	69	2	1	279
Kota Palangkaraya	23	11	53	295	3	4	389
Kab. Kapuas	50	10	174	492	1	1	728
Kab. KOTIM	48	10	142	421	5	2	628
Kab. KOBAR	23	5	129	280	4	-	441
Propinsi Kalteng	191	46	761	1791	17	9	2815

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Keberadaan sejumlah sarana dan sumberdaya manusia kesehatan di Propinsi Kalimantan Tengah tersebut ternyata belum mampu memenuhi substansi pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dibuktikan dengan tingginya rasio prasarana dan sumber daya manusia tersebut dibandingkan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani.

Tabel 2.15.
Rasio-Rasio Cakupan Pelayanan Kesehatan Propinsi Kalimantan Tengah, 2001

Keterangan	Barito Selatan	Barito Utara	Palangka Raya	Kapuas	Kotawari Ngin Timur	Kotawari Ngin Barat	Kateng
1. Rasio Dokter terhadap Jumlah Penduduk	7.700	8,396	7,461	10,257	10,229	10,797	9,433
2. Rasio Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk	92,405	96,554	171,614	256,434	245,493	248,324	180,171
3. Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk	1727	1857	3814	1150	1198	1774	214

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Tabel 2.15. menunjukkan bahwa pada tahun 2001 rasio dokter terhadap jumlah penduduk adalah 1 orang dokter melayani sebanyak: 9.433 jiwa penduduk, kemudian rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk adalah 1 unit rumah sakit melayani sebanyak 180.171 jiwa penduduk dan rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah 1 unit puskesmas melayani sebanyak 214 jiwa penduduk.

2.4.4 Profil Umum Sarana dan Prasarana serta SDM Pendidikan

Secara umum, keberadaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya manusia bidang pendidikan di Propinsi Kalimantan Tengah dapat dikatakan telah cukup memadai, hal ini dapat dilihat dari rendahnya rasio antara guru dan murid pada berbagai tingkat pendidikan dasar dan menengah.

Tabel 2.16.
Jumlah sekolah, Murid dan Guru Kalimantan Tengah, 2001

Keterangan	Jumlah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Rasio Murid/ Guru
SD	2735	278757	28878	9,65
SMP	382	64118	7846	8,17
SMU	106	40250	3181	12,65
SMU Kejuruan	34	16121	1649	9,78

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Tabel 2.16. diatas menunjukkan bahwa pada tingkat pendidikan dasar terdapat sebanyak 2.735 unit SD negeri dan swasta dengan jumlah murid sebanyak 278.757 orang dan guru sebanyak 28.878 orang, sedangkan rasio antara guru dan murid adalah 1 : 9,65. Pada tingkat pendidikan SMP, terdapat sebanyak 382 unit SMP negeri dan swasta dengan jumlah murid sebanyak 64.118 orang dan guru sebanyak 7.846 orang, sedangkan rasio antara guru dan murid adalah 1 : 8,17.

Selanjutnya pada tingkatan pendidikan menengah atas, terdapat sebanyak 106 unit SMU negeri dan swasta dengan jumlah murid sebanyak 64.118 orang dan guru sebanyak 3.181 orang, sedangkan rasio antara guru dan murid adalah 1 : 12,65. Kemudian terdapat sebanyak 34 unit SMU kejuruan dengan jumlah murid sebanyak 16.121 orang, rasio antara murid dan guru mencapai 1 : 9,78.

2.5. PEMERINTAH DAERAH

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat,

2.5.2 Peran Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah

Sesuai Perda Propinsi Kalimantan Tengah No. 7,8,9, dan 10 Tahun 2000, Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah antara lain:

1. Bertanggungjawab dalam menyelenggarakan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantu.
2. Bertanggungjawab dan melaksanakan Kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi bidang kehutanan; Tanaman Pangan dan Hortikultura; Pertambangan dan Energi; Kelautan dan Perikanan; Perhubungan dan Telekomunikasi; Pekerjaan Umum; Perindustrian dan Perdagangan; Koperasi dan UKM; Kesehatan; Pendidikan dan Kebudayaan; Kesejahteraan Sosial; Perkebunan; Pariwisata dan Seni Budaya; Tenaga Kerja; Pendapatan Daerah; Kehewan; Kependudukan dan transmigrasi; dan Bidang keahlian dan Kebutuhan lainnya.
3. Bertanggungjawab dan melaksanakan Kepegawaian Daerah; Pengawasan Daerah; Perfindungan Masyarakat, Kesatuan Bangsa dan Pamong Praja; Pendidikan dan Latihan; Perencanaan Pembangunan Daerah; Penelitian dan Pengembangan Daerah; Penanaman Modal Daerah; Pengelolaan dan Pelestarian Hidup Daerah; Pertanahan Propinsi; Pengolahan Data dan Sistem Informasi Daerah; Pemberdayaan Masyarakat; Perpustakaan dan Arsip Daerah; Kepemudaan dan Keolahragaan; Penghubung Pemerintah Daerah; dan Bidang keahlian dan Kebutuhan lainnya.

Dari Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah telah disebutkan di atas, perlu disinergikan bidang kewenangan perencanaan pembangunan daerah dengan bidang kewenangan yang ada dalam perencanaan anggaran (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah. Konversi

bidang kewenangan perencanaan pembangunan daerah tersebut mengacu pada bidang kewenangan propinsi yang disebutkan dalam PP 25 Tahun 2000.

Tabel 2.17.
Klasifikasi Bidang Kewenangan dan Organisasi
Pemerintah Propinsi Kalteng Sesuai PIP 25 Tahun 2000

BIDANG	UNIT ORGANISASI
1. Bidang Pemerintahan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • DPRD • Kepala dan Wakil Kepala Daerah • Sekretariat Daerah • Sekretariat DPRD • Dinas Pendapatan Daerah • Badan Perencanaan Pembangunan Daerah • Badan Pengawasan Daerah • Badan Kepegawaian Daerah • Badan Penelitian & Pengembangan Daerah • Badan Pendidikan dan Pelatihan • Badan Pengelolaan Data & informasi Daerah • Badan KESBANGLINMAS dan Polisi Pamong Praja • Kantor Penghubung Pemerintah Daerah
2. Bidang Pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertanian • Dinas Kehewan
3. Bidang Perikanan dan Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perikanan dan Kelautan
4. Bidang Pertambangan dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pertambangan dan Energi
5. Bidang kehutanan dan Perkebunan dan Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kehutanan • Dinas Perkebunan
6. Bidang Industri dan Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7. Bidang Perkoperasian	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Koperasi dan UKM
8. Bidang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> • Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah
9. Bidang Ketenag Kerjaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Tenaga Kerja
10. Bidang Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesehatan
11. Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
12. Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Kesejahteraan Sosial • Dinas Sosial
13. Bidang Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> •
14. Bidang Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> •
15. Bidang Pekerjaan Umum	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum
16. Bidang Perhubungan	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Perhubungan & Telekomunikasi

BIDANG	UNIT ORGANISASI
17. Bidang lingkungan Hidup	• Badan Pengelola dan Pelstarian Lingkungan Hidup Daerah
18. Bidang Kependudukan	• Dinas Kependudukan & Transmigrasi
19. Bidang Olahraga	• Badan Kepemudaan dan Keolahragaan
20. Bidang Kepariwisata	• Dinas Pariwisata dan Seni Budaya
21. Bidang Pertanian	• Badan Pertanian Nasional

2.5.3 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000, pasal 15 tentang Struktur APBD, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Dalam konteks Keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah akan dijelaskan perkembangan dan pertumbuhan Pendapatan Daerah, selanjutnya akan dijelaskan perkembangan dan pertumbuhan Belanja Daerah serta rasio-rasio Kapasitas Keuangan Daerah.

A. Penerimaan Daerah

Penerimaan Daerah terdiri dari Pajak Asli Daerah; Hasil Pajak dan bukan Pajak; Sumbangan dan Bantuan; dan Penerimaan Pembangunan. Dalam konteks Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan tengah dari Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
Perkembangan Realisasi Penerimaan Daerah,
1997/1998 - 2001 (000 Rp.)

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			
		97/98	98/99	00	01
	1	2	3	4	5
I	Penerimaan Daerah	237.579.817	176.876.637	237.298.545	258.734.279
1	Bagians sisa perhitungan anggaran thn yang lalu	11.365.096	9.682.736	24.557.132	33.989.871

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			
		97/98	98/99	00	01
	1	2	3	4	5
2	PAD	19.495.840	13.660.431	18.763.613	24.992.624
a.	Pajak Daerah	13.899.508	8.512.843	13.668.563	19.593.977
b.	Retribusi Daerah	3.304.020	1.609.944	1.344.429	1.406.093
c.	Bagian Laba BUMD	686.698	492.832	2.005.000	970.000
d.	Penerimaan dari dinas-dinas	214.181	1.522.406		
e.	Penerimaan lain-lain	1.391.433	1.522.406	1.745.821	3.022.608
3	Hasil Pajak dan Bukan Pajak	59.132.204	67.463.953	71.340.583	80.976.245
a.	Bagi hasil pajak	15.514.306	19.765.465	17.383.090	16.413.312
b.	Bagi hasil bukan pajak	43.617.898	47.698.488	53.957.493	64.562.933
4	Sumbangan dan Bantuan	158.915.773	95.752.253	147.194.349	118.409.996
a.	Sumbangan	91.875.871	26.257.453	33.789.626	
b.	Bantuan	67.075.905	69.494.800	113.404.723	118.409.996
5.	Penerimaan Pembangunan	0	0	0	34.355.414
a.	Pinjaman Pemerintah Daerah	0	0	0	0
b.	Pinjaman untuk BUMD	0	0	0	0
	Bagian urusan Kas dan Perhitungan (UKP)	15.750.053	4.675.383	5.890.833	2.850.450
	Jumlah Penerimaan (I + II)	253.329.870	181.552.020	243.189.378	261.584.729

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Perkembangan realisasi Penerimaan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Tengah secara umum cenderung mengalami kenaikan. Kenaikan ini ditunjukkan dengan jumlah penerimaan pada Tahun Anggaran 1997/1998 sebesar Rp. 253.329.870.000, meningkat jumlah penerimaan pada Tahun Anggaran 2001, sejumlah Rp. 261.584.729.000,- kecuali pada Tahun Anggaran 1998/1999, yang menurun, yaitu sejumlah Rp. 181.552.020.000,-.

Perkembangan jumlah penerimaan dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Kalimantan Tengah secara umum menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001. Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun

Anggaran 1997/1998, yaitu sejumlah Rp. 19.495.840.000,-, meningkat menjadi Rp. 24.992.624.000,- pada Tahun Anggaran 2001. Kecuali pada Tahun Anggaran 1998/1999, sejumlah Rp. 13.660.431.000,-. Kenaikan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan khususnya pos Pajak Daerah.

Perkembangan jumlah penerimaan dari sisi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Propinsi Kalimantan Tengah secara umum juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001. Jumlah penerimaan bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak pada Tahun Anggaran 1997/1998, yaitu sejumlah Rp 59.132.204.000,-, meningkat menjadi Rp. 80.976.245.000,- pada Tahun Anggaran 2001. Peningkatan penerimaan ini, disebabkan oleh meningkatnya penerimaan pos Bagi Hasil Bukan Pajak yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Perkembangan jumlah penerimaan dari sisi Sumbangan dan Bantuan secara umum mengalami perkembangan yang berfluktuatif selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001. Jumlah penerimaan Sumbangan dan Bantuan pada Tahun Anggaran 1997/1998, yaitu sejumlah Rp. 158.951.773.000,-, menurun menjadi Rp. 118.409.996.000,- pada Tahun Anggaran 2001. Penurunan ini, dipengaruhi oleh penurutan yang secara drastis dari pos Sumbangan Pemerintah Pusat, sedangkan Bantuan Pemerintah Pusat mengalami kenaikan yang melambat sebagai akibat penurunan kemampuan keuangan Negara.

Dalam konteks pertumbuhan realisasi Penerimaan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Tengah, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.19, secara umum menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat dengan pertumbuhan yang normal. Rata-rata pertumbuhan

realisasi Penerimaan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Tengah selama. Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, meningkat sebesar 4.39%/tahun.

Tabel 2.19.
Pertumbuhan Realisasi Penerimaan Daerah Otonom
Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
1997/1998-2001 (%)

No	Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran			Rata-rata
		97/98-98/99	98/99-00	00-01	Pertumbuhan
I	Penerimaan Daerah	-25,55%	34,16%	9,03%	5,88%
1	Bagian sisa lebih perhitungan anggaran thn yang lalu	-14,80%	153,62%	38,41%	59,08%
2	PAD	-29,93%	37,36%	33,20%	13,54%
a.	Pajak Daerah	-38,75%	60,56%	43,35%	21,72%
b.	Retnbusi Daerah	-51,27%	-16,49%	4,58%	-21,06%
c.	Bagian laba BUMD	-28,23%	306,83%	-51,62%	75,66%
d.	Penerimaan dari dinas-dinas				
e.	Penerimaan lain-lain	9,41%	14,66%	73,15%	32,41%
3	Hasil Pajak dan Bukan Pajak	14,09%	5,75%	13,51%	11,11%
a.	Bagi hasil pajak	27,40%	-12,05%	-5,58%	3,26%
b.	Bagi hasil bukan pajak	9,36%	13,12%	19,66%	14,04%
4	Sumbangan dan Bantuan	-39,76%	53,72%	-19,56%	-1,86%
a.	Sumbangan	-71,42%	28,69%		-21,37%
b.	Bantuan	3,61%	63,18%	4,41%	23,73%
5	Penerimaan Pembangunan				
a.	Pinjaman Pemerintah Daerah				
b.	Pinjaman untuk BUMD				
II	Bagian Urusan Kas dan Perhitungan	-70,32%	26,00%	-15,61%	-31,98%
	Jumlah Penerimaan (I + II)	-28,33%	33,95%	7,56%	4,39%

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Propinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pertumbuhan selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, meningkat sebesar 13,54%/tahun. Peningkatan rata-rata pertumbuhan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) dipengaruhi oleh peningkatan rata-rata pertumbuhan pos Pajak Daerah. Dari Sisi penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak Propinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pertumbuhan selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, meningkat sebesar 11,11%/tahun. Peningkatan rata-rata pertumbuhan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dipengaruhi oleh rata-rata pertumbuhan pos penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak. Dari sisi Sumbangan dan Pemerintahan Pusat terhadap Propinsi Kalimantan Tengah, rata-rata pertumbuhan selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, mengalami pertumbuhan negatif, yaitu sebesar -1,86%/tahun. Ratarata pertumbuhan negatif Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat dipengaruhi oleh rata-rata penurunan pos Sumbangan Pemerintah Pusat, yaitu sebesar 21,37%/tahun.

B. Pengeluaran Daerah

Dilihat dari sisi Anggaran Belanja (pengeluaran rutin dan pembangunan) Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah, jumlah realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan menunjukkan Perkembangan yang berfluktuatif antara Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, seperti ditunjukkan pada tabel 2.20. Jumlah realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan tertinggi terjadi pada T A . 1 9 9 7 / 1 9 9 8 , yaitu sejumlah Rp. 249.256.978.000,- dan yang terendah terjadi pada T A . 2 0 0 1 , yaitu sejumlah Rp. 164.294.533.000,

Perkembangan Realisasi Pengeluaran Rutin dan Pembangunan Daerah Otonom Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001 (000)

Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

No	Jenis Pengeluaran	Tahun Anggaran			
		97/98	98/99	00	01
	1	2	3	4	5
I	<i>Pengeluaran Rutin</i>	128.686.680	74.629.927	89.077.090	86.101.938
1	Belanja pegawai	85.545.344	26.291.359	34.461.678	39.934.450
2	Belanja barang	10.516.378	10.788.380	11.537.094	8.043.614
3	Biaya pemeliharaan	2.199.077	2.779.894	3.149.037	2.340.640
4	Biaya perjalanan Dinas	4.674.345	5.199.231	6.514.930	4.715.382
5	Belanja lain-lain	10.279.138	9.255.317	13.023.864	7.875.508
6	Angsuran pinjaman	9.312	8.980	9.048	
7	Ganjaran subsidi	9.921.037	12.382.747	12.790.973	16.338.129
8	Pensiunan/bantuan dan ondersta				
9	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lainnya	4.435.749	5.740.232	4.655.797	3.941.983
10	Pengeluaran tak terduga	1.106.300	2.186.787	2.934.669	2.912.232
II	<i>Pengeluaran Pembangunan</i>	104.820.245	85.849.907	128.340.716	75.342.145
1	Peranian dan pengairan	15.622.917	12.964.889	12.458.973	13.243.492
2	Industri (industri rakyat)	596.830	504.163	783.773	391.698
3	Pertambangan dan Energi	797.039	364.266	549.485	474.660
4	Perhubungan dan Pariwisata	36.520.920	35.558.440	63.913.337	1.048.455
5	Perdagangan dan Koperasi	3.227.132	1.690.636	3.172.230	2.549.079
6	T. Kerja dan Pemukiman kembali		64.144	98.129	98.945
7	Pembangunan Daerah	2.880.026	3.564.170	1.651.816	2.186.577
8	Agama	2.526.523	3.032.910	3.943.019	4.613.309
9	Pendidikan Generasi Muda Kebudayaan Nasional Kepercayaan kpd Tuhan YME	6.272.324	3.230.618	8.823.447	15.414.101
10	Kesehatan Kesejahteraan	2.778.541	3.009.349	8.358.983	14.067.264
11	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	595.686	223.270	520.384	779.162
12	Hukum	97.175	148.092	393.088	269.154
13	Keamanan dan Tibum	820.592	480.606	891.104	396.634
14	Penerangan Pers dan Komk Sos	2.117.850	1.529.193	2.427.968	314.350
15	Iptek dan Penelitian	854.688	612.378	4.122.260	4.081.810
16	Aparatur Pemerintahan	19.538.512	9.279.519	13.240.328	12.137.759
17	Pengembangan Dunia				
18	Sumber Alama dan Lingk. Hidup	2.020.306	2.009.280		3.275.696

No	Jenis Pengeluaran	Tahun Anggaran			
		97/98	98/99	00	01
	1	2	3	4	5
19	Subsidi/Bant.Pemb.Kpd drh Bawah	7.553.184	7.583.984		
20	Pembayaran Kembali Pinjaman			2.992.392	
III	Urusan Kas dan Perhitungan Rutin	15.685.053	4.675.383	10.430.000	2.850.450
IV	Urusan Kas dan Perhitungan Pembangunan	65.000			
	Jumlah Pengeluaran (I + II + III + IV)	249.256.978	165.155.217	227.847.806	164.294.533

Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran rutin Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah menunjukkan perkembangan yang berfluktuatif. Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran rutin yang tertinggi, terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998, yaitu sejumlah Rp. 128.686.680.000,- dan yang terendah, terjadi pada Tahun Anggaran 1998/1999, yaitu sejumlah Rp. 74.629.927.000,-. Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran rutin yang tertinggi dipengaruhi oleh besarnya jumlah pos belanja pegawai, yaitu sejumlah Rp. 85.545.344.000,-. Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran rutin yang terendah dipengaruhi oleh menurunnya secara drastis jumlah pos belanja pegawai, yaitu sejumlah Rp. 26.291.359.000,

Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran pembangunan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah juga menunjukkan Perkembangan yang berfluktuatif. Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran pembangunan yang tertinggi, terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998, yaitu sejumlah Rp. 104.820.245.000,- dan yang terendah terjadi pada Tahun Anggaran 2001, yaitu sejumlah Rp 75.342.145.000, Perkembangan jumlah realisasi pengeluaran pembangunan disebut tertinggi disebabkan oleh besarnya jumlah pengeluaran sektor Perhubungan dan Pariwisata; Aparatur Pemerintahan; dan pertanian

dan pengairan. Perkembangan. jumlah realisasi pengeluaran pembangunan disebut terendah disebabkan oleh menurunnya secara tajam, jumlah pengeluaran sektor Perhubungan dan Pariwisata, sedangkan Sektor Aparatur Pemerintahan; dan Pertanian dan Pengairan tidak mengalami penurunan jumlah pengeluaran secara tajam.

Dari sisi pertumbuhan realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah dari Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, menunjukkan rata-rata pertumbuhan yang negatif (penurunan), yaitu sebesar -7,89%/tahun, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.21. Pertumbuhan realisasi pengeluaran rutin dan pembangunan yang tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 1998/1999 - 2000, yaitu sebesar 37,96%. Sedangkan pertumbuhan yang terendah terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998 - 1998/1999, yaitu sebesar -33,74% (pertumbuhan negatif).

Tabel 2.21
Pertumbuhan Realisasi Pengeluaran Rutin dan
Pembangunan Daerah Otonomi Propinsi Kalimantan
Tengah Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001 (%)
 Sumber data: Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

No	Jenis Pengeluaran	Tahun Anggaran			Rata-rata
		97/98-98/99	98/99-00	00-01	Pertumbuhan
	1	2	3	4	5
I	Pengeluaran Rutin	-42,01%	19,36%	-3,34%	-8,66%
1	Belanja pegawai	-69,27%	31,08%	15,88%	-7,44%
2	Belanja barang	2,59%	6,94%	-30,28%	-6,92%
3	Biaya pemeliharaan	26,28%	13,40%	-25,67%	4,67%
4	Biaya perjalanan dinas	11,23%	25,31%	-27,62%	2,97%
5	Belanja lain-lain	-9,96%	40,72%	-39,53%	-2,92%
6	Angsuran pinjaman	-3,57%	0,76%		-1,40%
7	Ganjaran subsidi	24,81%	3,30%	27,73%	18,61%
8	Pengeluaran yang tidak termasuk Bagian lainnya	29,41%	-18,89%	-15,33%	-1,61%
9	Pengeluaran tak terduga	97,67%	34,20%	-0,76%	43,70%

No	Jenis Pengeluaran	Tahun Anggaran			Rata-rata Pertumbuhan
		97/98-98/99	98/99-00	00-01	97/98-01
	1	2	3	4	5
II	<i>Pengeluaran Pembangunan</i>	-18,10%	49,49%	-41,30%	-3,30%
1	Pertanian dan pengairan	-17,01%	-3,90%	6,30%	-4,87%
2	Industri (Industri Rakyat)	-15,53%	55,46%	-50,02%	-3,36%
3	Pertambangan dan Energi	-54,30%	50,85%	-13,62%	-5,69%
4	Perhubungan dan Pariwisata	-2,64%	79,74%	-98,36%	-7,08%
5	Perdagangan dan Koperasi	-47,61%	87,64%	-19,64%	6,79%
6	T. Kerja dan Pemukiman kembali		52,98%	0,83%	26,91%
7	Pembangunan Daerah	23,75%	-53,65%	32,37%	0,82%
8	Agama	20,04%	30,01%	17,00%	22,35%
9	Pendidikan Generasi Muda Kebudayaan Nasional Kepercayaan kpd Tuhan YME	-48,49%	173,12%	74,69%	66,44%
10	Kesehatan kesejahteraan	8,31%	177,77%	68,29%	84,79%
11	Perumahan Rakyat dan Pemukiman	-62,52%	133,07%	49,73%	40,09%
12	Hukum	52,40%	165,43%	-31,53%	62,10%
13	Keamanan dan Tibum	-41,43%	85,41%	-55,49%	-3,84%
14	Penerangan Pers dan Komks Sos	-27,80%	58,77%	-87,05%	-18,69%
15	Iptek dan Penelitian	-28,35%	573,16%	-0,98%	181,27%
16	Aparatur Pemerintah	-52,51%	42,68%	-8,33%	-6,05%
17	Pengembangan Dunia				
18	Sumber Alama dan Lingk. Hidup	-0,55%			-0,55%
19	Subsidi/bant.Pemb.kpd drh bawahan	0,41%			0,41%
20	Pembayaran kembali Pinjaman				
III	<i>Usan Kas dan Perhitungan Rutin</i>	-70,19%	123,08%	-72,67%	-6,59%
IV	<i>Usan Kas dan Perhitungan Pembangunan</i>				
	Jumlah Pengeluaran (I+II+III+IV)	-33,74%	37,96%	-27,89%	-7,89%

Perkembangan yang lebih spesifik dari realisasi pengeluaran rutin Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, mengalami rata-rata pertumbuhan yang negatif (penurunan), yaitu sebesar - 8,66%/tahun. Rata-rata pertumbuhan yang tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 1998/1999 - 2000, yaitu sebesar 19,36% dan yang terendah terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998- 1998/1999, yaitu sebesar - 42,01 % (penurunan).

Rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pem-

angunan. Pemerintah Propinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001 mengalami pertumbuhan yang negatif, yaitu sebesar - 3,30%/tahun. Rata-rata pertumbuhan realisasi pengeluaran pembangunan yang tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 1998/1999 - 2000, yaitu sebesar 49,49% dan yang terendah terjadi pada Tahun Anggaran 1999/2000 - 2001, yaitu sebesar - 41,30% (penurunan).

C. Kemampuan Keuangan Daerah

Kapasitas Keuangan Daerah merupakan kemampuan suatu daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan daerah yang berbentuk pengeluaran rutin dan pembangunan. Dalam konteks Propinsi Kalimantan Tengah, akan dilihat seberapa besar kemampuan keuangan Daerah untuk membiayai pengeluarannya. Kemampuan keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat pada tabel 2.21, berikut:

Tabel 2.22.
Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah
Propinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran
1997/1999 - 2001 (000 Rp.)

Sumber data : Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2001

No	Uraian	Tahun Anggaran			
		97/98	98/99	00	01
	1	2	3	4	5
A.	Penerimaan Daerah				
1.	PADS	78.628.044	81.124.384	90.104.196	105.968.869
a	PAD	19.495.840	13.660.431	18.763.613	24.992.624
b	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	59.132.204	67.463.953	71.340.583	80.976.245
2.	Sumbangan dan Bantuan	174.701.826	100.427.636	153.085.182	155.615.860
	Jumlah Penerimaan Daerah	253.329.870	181.552.020	243.189.378	261.584.729

No	Uraian	Tahun Anggaran			
		97/98	98/99	00	01
	1	2	3	4	5
C.	Pengeluaran Daerah				
1	Pengeluaran Rutin	144.371.733	79.305.310	99.507.090	88.952.388
2	Pengeluaran Pembangunan	104.885.245	85.849.907	128.340.716	75.342.145
	Jumlah Pengeluaran Daerah	249.256.978	165.155.217	227.847.806	164.294.533
E.	Surplus/Defisit	4.072,892	16.396.803	15.341.572	97.290.196
I.	Rasio PADS terhadap Pengeluaran Daerah	31,54%	49,12%	39,55%	64,50%
II.	Rasio PADS terhadap Pengeluaran Rutin	54,46%	102,29%	90,55%	119,13%

Perkembangan Surplus/Defisit Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Propinsi Kalimantan Tengah selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001 menunjukkan jumlah surplus yang terus meningkat. Peningkatan jumlah surplus yang tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2001, yang berjumlah Rp. 97.290.196.000,- dan Surplus APBD yang terendah terjadi pada Tahun anggaran 1997/1998, yang berjumlah yang Rp. 4.072.892.000,-.

Kemampuan keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dilihat dari sisi rasio PADS terhadap Pengeluaran Daerah selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, secara umum belum mampu memenuhi pengeluaran Daerahnya dan memiliki kecenderungan yang berflukatif. Dalam Konteks ini, kemampuan keuangan Daerah yang proporsinya tertinggi terjadi pada Tahun Anggaran 2001, yaitu sebesar 64,50%. dan kemampuan keuangan daerah yang proporsi terendah terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998, yaitu sebesar 31,54%. Perkembangan peningkatan kondisi

kemampuan keuangan Daerah disebut proporsinya tertinggi disebabkan oleh adanya. Peningkatan pos Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dan adanya perubahan pada kebijakan pemerintah tentang fiskal daerah pada tahun 2000. Kondisi kemampuan keuangan Daerah disebut proporsinya terendah disebabkan oleh rendahnya PAD Propinsi Kalimantan Tengah.

Kemampuan keuangan Daerah Propinsi Kalimantan Tengah dilihat dari sisi rasio PADS terhadap Pengeluaran Rutin selama Tahun Anggaran 1997/1998 - 2001, secara umum sudah mampu memenuhi Pengeluaran Rutinnya. Kondisi kemampuan PADS sudah mampu memenuhi Pengeluaran Rutin terjadi pada Tahun Anggaran 2001 yaitu sebesar 119,13% dan Tahun Anggaran 1998/1999, yaitu sebesar 102,29%. Sedangkan kemampuan PADS yang belum mampu memenuhi Pengeluaran Rutin terjadi pada Tahun Anggaran 1997/1998, yaitu sebesar 54,46% dan Tahun Anggaran 2000, yaitu sebesar 90,55%.